

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan sebagai entitas yang berorientasi pada pencapaian laba maksimal kini dihadapkan pada tuntutan untuk tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada keberlanjutan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep ini dikenal dengan istilah *triple bottom line: profit, people, dan planet* (Bini & Bellucci, 2019). Dalam konteks ini, laporan keberlanjutan (*sustainability report*) menjadi instrumen penting untuk mengkomunikasikan kinerja perusahaan kepada pemangku kepentingan. Hal ini semakin mendesak terutama di sektor industri yang memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat dan lingkungan, seperti pertambangan (Damayanti & Hardiningsih, 2021).

Adanya dorongan global untuk menerapkan praktik pelaporan yang berorientasi pada prinsip keberlanjutan. Dalam praktiknya standar pelaporan yang banyak digunakan adalah *Global Reporting Initiative (GRI Standards)*, yang pada 2021 diperbarui untuk menekankan pengungkapan berbasis dampak (*impact-based disclosure*), materialitas, dan keterlibatan pemangku kepentingan (GRI, 2021). Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan regulasi (POJK No. 51/POJK.03/2017) yang mewajibkan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keberlanjutan setiap tahun. Namun, meskipun regulasi ini ada, banyak perusahaan yang masih belum mematuhi ketentuan tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh untuk tahun 2023, hanya 54,2% dari 48 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang telah mempublikasikan laporan keberlanjutan secara eksplisit menggunakan

Standar GRI 2021 dan masih terdapat 6 perusahaan yang belum menerbitkan laporan keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum sepenuhnya memiliki kesadaran terhadap pentingnya pelaporan keberlanjutan.

Fenomena transisi energi bersih yang meningkat juga berkontribusi pada permintaan mineral, termasuk nikel, yang menjadi salah satu komoditas utama Indonesia. Menurut *International Energy Agency* (IEA, 2021) permintaan mineral diperkirakan akan meningkat secara signifikan pada tahun 2040, yang menuntut perusahaan untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya dan dampak lingkungannya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan Energi Baru Terbarukan (EBT), yang diharapkan akan berkontribusi sebesar dua pertiga dari kebutuhan energi global pada tahun 2050. Ketahanan energi masa depan sangat dipengaruhi oleh keterjaminan akses terhadap mineral kritis yang dibutuhkan dalam pengembangan teknologi energi berkelanjutan. Indonesia dengan sumber daya alam yang melimpah menjadi penghasil nikel nomor satu dan menjadi penghasil timah terbesar kedua di dunia (CNBC Indonesia, 2023) .

Kasus Korupsi PT Timah Tbk yang pertama kali dibicarakan pada tanggal 17 Oktober 2023 adanya pembiaran aktivitas penambangan liar & penyalahgunaan wewenang oleh beberapa pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari buruknya tata kelola. Ahli lingkungan mengkalkulasikan semua kerugian dari rusaknya lingkungan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 7 Tahun 2014, total kerugian lingkungan mencapai Rp. 271.069.688.018.700. Nilai sebesar 271 triliun adalah perhitungan kerugian lingkungan dalam kawasan hutan & non kawasan hutan, kalkulasi kerusakan lingkungan tersebut terhitung dari tahun 2015-2022 dengan total galian kasus PT Timah Tbk di Bangka Belitung sekitar 170.363.064

hektar yang memiliki IUP hanya sebesar 52% dari total galian (Eprilia *et al.*, 2024; Detiknews, 2023).

Berdasarkan fenomena tersebut, di tengah *tren sustainability report* yang mengglobal dan juga Investor sangat mempertimbangkan untuk berinvestasi pada perusahaan yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. Perusahaan yang bertujuan untuk meraih laba dituntut agar lebih bertanggung jawab dan seharusnya tidak mengorbankan lingkungan dan masyarakat sekitarnya (Wahyuni *et al.*, 2020).

Sektor pertambangan menjadi objek penting untuk dianalisis karena karakteristik industrinya yang memiliki eksposur tinggi terhadap dampak lingkungan dan sosial, sehingga legitimasi sosial dan pengungkapan informasi keberlanjutan menjadi sangat krusial. *Legitimacy theory* menyatakan bahwa perusahaan membutuhkan pengakuan dari masyarakat agar dapat mempertahankan eksistensinya (Suchman, 1995). Dalam konteks ini, laporan keberlanjutan digunakan sebagai alat untuk memperoleh atau memulihkan legitimasi. Sementara itu, *agency theory* menjelaskan bahwa adanya konflik kepentingan antara manajer dan pemilik dapat diminimalkan melalui penyediaan informasi yang lengkap dan dapat dipercaya, termasuk melalui pelaporan keberlanjutan (Jensen & Meckling, 1976) .

Pelaporan keberlanjutan tidak muncul secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal dan internal perusahaan. Salah satunya adalah *litigation risk* atau risiko hukum yang mengacu pada kemungkinan perusahaan menghadapi tuntutan hukum atas kegiatan operasionalnya. Perusahaan dengan risiko litigasi yang tinggi cenderung meningkatkan pengungkapan untuk melindungi citra dan reputasi, serta sebagai bentuk tanggung

jawab sosial yang diharapkan dapat mengurangi tekanan dari pihak eksternal (Lindblom, 1994).

Faktor lainnya adalah *leverage*, yaitu tingkat ketergantungan perusahaan pada utang. Perusahaan dengan *leverage* tinggi memiliki tekanan untuk mempertahankan hubungan baik dengan kreditur, yang mendorong mereka untuk lebih transparan dalam pengungkapan informasi, termasuk pelaporan keberlanjutan. Hal ini berkaitan dengan *agency cost* yang muncul akibat konflik antara manajer dan kreditur (Ahmed & Duellman, 2007).

Selanjutnya, *financial distress* atau tekanan keuangan dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk mengungkapkan informasi keberlanjutan. Beberapa studi menemukan bahwa perusahaan yang mengalami tekanan keuangan cenderung menurunkan tingkat pengungkapan karena keterbatasan sumber daya dan upaya efisiensi biaya (Plumlee et al., 2015). Di sisi lain, beberapa perusahaan justru meningkatkan pengungkapan sebagai strategi untuk menarik simpati investor dan pemangku kepentingan.

Pengaruh antara faktor-faktor tersebut dengan pelaporan keberlanjutan, konservatisme akuntansi dipandang sebagai variabel mediasi yang penting. Konservatisme akuntansi adalah prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan, yang cenderung mengakui kerugian lebih awal dan menunda pengakuan laba hingga benar-benar terealisasi. Perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi dianggap lebih andal dan transparan dalam menyajikan informasi, sehingga dapat memperkuat legitimasi pelaporan keberlanjutan (Basu, 1997).

Merujuk pada Dewiyanti, *et al* (2022) yang melakukan penelitian dengan judul "*The Role of Accounting Conservatism Influence Financial Distress and Litigation Risk on Sustainability Report of Infrastructure Companies Listed on*

Indonesian Stock Exchange for the Period 2019-2021". Penelitian ini berfokus pada bagaimana *accounting conservatism* dapat memediasi hubungan antara *financial distress* dan *litigation risk* terhadap *sustainability report* pada perusahaan Infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021. Hasil pengujian baik secara langsung maupun tidak langsung menunjukkan bahwa *accounting conservatism* dapat menjelaskan secara penuh hubungan antara *litigation risk* dengan *sustainability report*. Dengan kata lain *litigation risk* tidak berpengaruh signifikan terhadap *sustainability report*. Sedangkan *financial distress* terbukti berpengaruh signifikan terhadap *sustainability report* dan *accounting conservatism* merupakan faktor yang secara parsial menjelaskan pengaruh tersebut terhadap *sustainability report*.

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian yang dilakukan Dewiyanti, *et al* (2022) dengan menambah variabel yang dapat mempengaruhi *sustainability report* melalui *accounting conservatism*. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu pada penelitian tersebut proxy yang digunakan untuk mengukur *litigation risk* menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) yang mana proxy ini adalah pengukuran dari *leverage*. Maka dari itu penelitian ini menggunakan variabel *litigation risk* dengan proxy yang berbeda dan menambahkan variabel *leverage* sebagai variabel independen serta variabel dependen yang di proxy dengan menggunakan standar GRI terbaru yaitu GRI 2021 dan berfokus pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024. Sehingga penelitian ini mengambil judul yaitu "*Pengaruh Litigation Risk, Financial Distress dan Leverage Terhadap Sustainability Report dengan Accounting Conservatism Sebagai Variabel Mediasi*"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *litigation risk* berpengaruh terhadap *sustainability report* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024?
2. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *sustainability report* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *sustainability report* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024?
4. Apakah *accounting conservatism* berpengaruh terhadap *sustainability report* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024?
5. Apakah *litigation risk* berpengaruh terhadap *sustainability report* melalui *accounting conservatism* sebagai variabel mediasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024?
6. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *sustainability report* melalui *accounting conservatism* sebagai variabel mediasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024?
7. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *sustainability report* melalui *accounting conservatism* sebagai variabel mediasi pada perusahaan

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis :

1. Pengaruh *litigation risk* terhadap *sustainability report* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024.
2. Pengaruh *financial distress* terhadap *sustainability report* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024.
3. Pengaruh *leverage* terhadap *sustainability report* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024.
4. Pengaruh *accounting conservatism* terhadap *sustainability report* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024.
5. Pengaruh *accounting conservatism* dalam memediasi bungan *litigation risk* terhadap *sustainability report* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024.
6. Pengaruh *accounting conservatism* dalam memediasi bungan *fianncial distress* terhadap *sustainability report* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024.

7. Pengaruh *accounting conservatism* dalam memediasi bunga *leverage* terhadap *sustainability report* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2022-2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori akuntansi, khususnya mengenai peran *accounting conservatism* dalam pengaruh *litigation risk*, *financial distress*, dan *leverage* terhadap *sustainability report*. Penelitian ini dapat memberikan implikasi bagi pengembangan teori keagenan dan legitimasi dalam konteks akuntansi. Penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana *accounting conservatism* dapat menjadi mekanisme untuk mengurangi konflik kepentingan dan mempertahankan legitimasi perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Penelitian ini dapat memberikan inspirasi bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji topik yang sama atau sejenis dengan menggunakan variabel, metode, kasus, atau periode yang berbeda. Penelitian ini dapat memberikan referensi dan sumber informasi yang valid dan terpercaya bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dalam mengelola *litigation risk*, *financial distress*, *leverage*, *accounting conservatism*, dan *sustainability report*. Penelitian ini dapat memberikan saran-saran yang dapat membantu perusahaan pertambangan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan tanggung jawab sosial, mengurangi risiko hukum dan keuangan, mengoptimalkan struktur modal, dan menerapkan prinsip konservatisme akuntansi. Penelitian ini

dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dalam meningkatkan kemampuan dan kompetensi dalam melakukan penelitian ilmiah, khususnya di bidang akuntansi. Penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan pembelajaran yang berharga bagi penulis dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam penelitian ilmiah.

1.5 Sistematika Penulisan

Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Universitas Hasanuddin Tahun 2013 dijadikan acuan dalam penulisan tesis ini. Adapun pedomannya adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, bab ini berisikan informasi kepada pembaca tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaannya, dan ruang lingkupnya. Bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan pustaka, teori dan konsep dasar penelitian dijelaskan dalam bab ini. Bab ini juga menjelaskan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian saat ini.

Bab III: Kerangka dan hipotesis, bab ini merumuskan dan menyediakan kerangka kerja untuk studi empiris dan teoritis. Pola pikir adalah dasar untuk pengembangan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang dipelajari.

Bab IV: Metode penelitian, bab ini membahas topik-topik desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, serta alat dan teknik analisis data.

Bab V : Hasil penelitian, bab ini menyajikan data dan hasil penelitian. Data dan hasil naratif digunakan dalam penyajian hasil penelitian, yang disertai dengan analisis statistik, uji hipotesis, tabel, grafik, dan gambar.

Bab VI : Pembahasan, pembahasan bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, menafsirkan temuan-temuan, mengintegrasikan hasil dan temuan pada ilmu atau teori yang telah mapan, atau memodifikasi teori yang sudah ada.

Bab VII : Penutup, bab ini menyajikan temuan, implikasi, keterbatasan dan saran penelitian. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Keterbatasan penelitian menguraikan hal-hal yang membatasi penelitian. Saran dibuat berdasar hasil penelitian dan pertimbangan peneliti yang ditujukan kepada para peneliti lain yang akan melanjutkan atau mengembangkan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 *Agency Theory*

Teori agensi, yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976), menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer) dalam konteks perusahaan. Dalam hubungan ini, terdapat potensi konflik kepentingan yang muncul akibat asimetri informasi, di mana agen mungkin tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan sering menggunakan mekanisme pelaporan, termasuk laporan keberlanjutan (*sustainability report*), untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi biaya agensi. Sebuah studi oleh Lanis dan Richardson (2015) Lanis dan Richardson (2015) menunjukkan bahwa perusahaan yang berada di bawah tekanan dari pemangku kepentingan cenderung meningkatkan pengungkapan non-keuangan, termasuk laporan keberlanjutan, untuk memperkuat posisi mereka di mata investor.

Dalam konteks ini, laporan keberlanjutan berfungsi sebagai alat strategis untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Pengungkapan informasi yang lebih luas dapat membantu manajer untuk menunjukkan bahwa mereka bertindak dalam kepentingan prinsipal, sehingga mengurangi risiko konflik kepentingan. Selain itu, laporan keberlanjutan juga dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan menarik investor yang lebih peduli terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Dengan demikian, teori agensi memberikan kerangka kerja yang bermanfaat untuk memahami bagaimana.

perusahaan dapat menggunakan laporan keberlanjutan sebagai alat untuk mengelola hubungan mereka dengan pemangku kepentingan.

2.1.2 Legitimasi Theory

Teori legitimasi, seperti yang dijelaskan oleh Suchman (1995), berfokus pada upaya organisasi untuk memperoleh legitimasi sosial agar dapat beroperasi dengan baik. Dalam konteks laporan keberlanjutan, perusahaan berusaha menunjukkan bahwa mereka beroperasi sesuai dengan norma dan nilai masyarakat. Deegan (2002) mengemukakan bahwa perusahaan yang beroperasi di sektor dengan risiko lingkungan yang tinggi, seperti pertambangan, menggunakan laporan keberlanjutan untuk mempertahankan hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan regulator. Hal ini penting, karena legitimasi sosial dapat mempengaruhi keberlangsungan operasional perusahaan.

Perusahaan yang gagal dalam memenuhi harapan masyarakat dan pemangku kepentingan dapat menghadapi risiko kehilangan legitimasi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja keuangan mereka. Oleh karena itu, laporan keberlanjutan bukan hanya sekadar alat untuk mengungkapkan informasi, tetapi juga merupakan strategi untuk memperoleh legitimasi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan yang berinvestasi dalam pengungkapan keberlanjutan yang transparan dan komprehensif dapat mengurangi risiko reputasi dan meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan.

2.1.3 Sustainability Report

Laporan keberlanjutan (*sustainability report*) adalah dokumen yang menyajikan informasi mengenai dampak sosial-ekonomi serta kinerja suatu organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Saputra *et al.*,

2019). Berdasarkan pedoman GRI (2021), pelaporan keberlanjutan adalah praktik pengungkapan kepada publik dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang paling signifikan, Oleh karena itu, hal ini berkontribusi baik positif atau negatif terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pelaporan berkelanjutan tidak hanya terbatas pada penyusunan laporan, melainkan juga merupakan suatu metode untuk menginternalisasi dan meningkatkan komitmen organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan dengan cara yang nyata bagi seluruh pemangku kepentingan.

Sustainability report adalah dokumen yang menyajikan informasi mengenai dampak aktivitas perusahaan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (GRI 2021). Laporan ini mengomunikasikan strategi keberlanjutan perusahaan kepada para pemangku kepentingan dan menjadi bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap aspek lingkungan dan sosial yang semakin mendapat perhatian publik. Standar pengungkapan *sustainability report* yang banyak digunakan adalah GRI Standards 2021, yang terdiri dari tiga komponen: GRI Universal Standards, GRI *Sector Standards*, dan GRI *Topic Standards*. Pengukuran tingkat pengungkapan dapat dilakukan melalui *content analysis*, dengan menghitung skor berdasarkan banyaknya indikator GRI yang diungkapkan oleh perusahaan (Hermawan *et al.*, 2022). Di Indonesia, pelaporan keberlanjutan juga diatur dalam POJK No. 51/POJK.03/2017 dan diperkuat melalui SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Kualitas pengungkapan *sustainability report* ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal perusahaan, di antaranya konservatisme akuntansi sebagai pendekatan pelaporan yang lebih hati-hati. Selain itu, terdapat pula faktor risiko seperti risiko litigasi, tekanan finansial, dan struktur pendanaan yang

berperan dalam mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi lebih terbuka.

2.1.4 *Accounting Conservatism*

Konservatisme akuntansi adalah prinsip yang mendorong pengakuan kerugian lebih awal dan penundaan pengakuan keuntungan hingga benar-benar terealisasi (Basu, 1997). Prinsip ini dianggap meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kredibilitas informasi yang disampaikan oleh perusahaan (Savitri, 2016). Dalam konteks penelitian ini, konservatisme akuntansi berfungsi sebagai variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara risiko internal perusahaan dan laporan keberlanjutan. Dewiyanti *et al* (2022) mencatat bahwa dengan menerapkan konservatisme, perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi, tetapi tetap menunjukkan komitmen terhadap transparansi melalui laporan keberlanjutan.

Pengukuran konservatisme dapat dilakukan melalui berbagai model, seperti model Basu atau pendekatan akrual negatif (Ahmed & Duellman, 2007). Dalam praktiknya, perusahaan yang menerapkan konservatisme akuntansi akan lebih cenderung untuk mengungkapkan informasi yang mencerminkan risiko yang mereka hadapi, termasuk risiko litigasi dan tekanan finansial. Hal ini penting, karena pengungkapan yang lebih transparan dapat membantu perusahaan dalam mengelola ekspektasi pemangku kepentingan dan mengurangi potensi risiko reputasi.

2.1.5 *Litigation Risk*

Risiko litigasi dapat dipahami sebagai risiko yang terkait dengan perusahaan yang memungkinkan terjadinya ancaman tindakan hukum dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan merasa dirugikan oleh perusahaan. Pihak-

pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan meliputi kreditur, investor dan regulator (Suryandari & Priyanto, 2012).

Litigation risk merujuk pada potensi perusahaan menghadapi tuntutan hukum akibat tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum atau norma etika (Krishnan & Visvanathan, 2008). Perusahaan dengan tingkat risiko litigasi tinggi cenderung meningkatkan transparansi dan pengungkapan untuk mengurangi potensi kerugian reputasi. Dalam konteks ini, konservatisme akuntansi juga dapat diadopsi sebagai strategi mitigasi risiko, di mana pengungkapan keberlanjutan yang lebih lengkap menjadi bagian dari strategi legitimasi perusahaan. Pengukuran *litigation risk* dapat menggunakan indikator pengungkapan kasus hukum atau keberadaan gugatan dalam laporan tahunan. (Robinson et al., 2024) menemukan bahwa perusahaan dengan eksposur hukum tinggi meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan.

2.1.6 Financial Distress

Financial distress merupakan kondisi keuangan yang mana perusahaan mengalami tekanan keuangan serius, seperti kesulitan membayar utang atau kerugian berkelanjutan. Altman Z-score (Altman, 1968) sering digunakan untuk mengukur tingkat *financial distress*. Kondisi ini dapat mendorong perusahaan untuk menyesuaikan strategi pengungkapannya. Sebagian perusahaan mungkin mengurangi pelaporan karena keterbatasan sumber daya, namun ada pula yang justru meningkatkan pengungkapan untuk menunjukkan keberlanjutan operasionalnya di tengah krisis (Plumlee et al., 2015). Dalam situasi distress, konservatisme akuntansi menjadi penting karena memastikan bahwa laporan keuangan tidak memberikan ekspektasi yang berlebihan. Hidayat dan Meiranto (2014) berpendapat bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* yaitu

perusahaan yang kinerjanya menunjukkan laba operasinya negatif, laba bersih negatif nilai buku ekuitas negatif dan perusahaan yang melakukan merger. Berdasarkan uraian di atas, salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai *financial distress* sebuah perusahaan adalah EBIT negatif.

2.1.7 Leverage

Leverage menggambarkan proporsi penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. *Leverage* yang tinggi menyebabkan perusahaan berada dalam tekanan lebih besar dari kreditur, sehingga mendorong transparansi informasi, termasuk pelaporan keberlanjutan Jensen (1986). Dalam konteks ini, pengaruh *leverage* terhadap *sustainability report* dapat diperkuat melalui penerapan konservatisme akuntansi yang membuat pelaporan lebih dapat dipercaya oleh pihak eksternal. Pengukuran *leverage* dilakukan dengan rasio *Debt to Asset* atau *Debt to Equity*. Ho *et al.* (2023) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

2.2 Tinjauan Empiris

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

Suwasono & Anggraini (2021) melakukan penelitian untuk menganalisis pengaruh *financial distress*, *leverage*, umur perusahaan, tipe industri dan *gender diversity* terhadap *sustainability report* pada perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2022. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari 84 perusahaan yang beroperasi di sektor tersebut antara tahun 2017-2020. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh total 33 sampel. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *financial distress*, *leverage*, dan jenis industri memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *sustainability report*, sementara umur perusahaan dan keberagaman gender menunjukkan pengaruh positif.

Rahayu *et al.*, (2018) menyelidiki pengaruh *leverage*, *litigation risk*, *financial distress*, *political cost*, dan *company growth* terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian ini terdiri dari 144 perusahaan manufaktur selama periode 2013-2016. Sampel diambil dengan metode *purposive sampling*, menghasilkan 32 sampel. Analisis data dilakukan menggunakan regresi berganda dengan perangkat lunak SPSS 21. Hasil analisis menunjukkan bahwa *political cost* tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi, sedangkan *leverage*, *litigation risk*, *financial distress*, dan *company growth* berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

Wulandari, C. (2022) meneliti pengaruh *debt covenant*, kepemilikan institusional, dan risiko litigasi terhadap konservatisme akuntansi pada perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini, populasi terdiri dari 47 perusahaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria perusahaan yang telah melakukan IPO sebelum tahun 2015 dan memiliki data lengkap dalam laporan keuangan antara tahun 2015-2019, menghasilkan 33 perusahaan sebagai sampel. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko litigasi memiliki pengaruh negatif terhadap konservatisme akuntansi, sedangkan *debt covenant* dan kepemilikan institusional tidak menunjukkan pengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

Mo (2015) menyelidiki hubungan dinamis antara pengungkapan sukarela dan konservatisme dengan menguji hubungan variabel tersebut seputar pembiayaan utang. Pembiayaan utang dapat menjadi latar alami yang baik dalam menguji hubungan antara pengungkapan sukarela dan konservatisme karena keduanya berperan penting dalam mengurangi asimetri informasi pada saat pembiayaan utang. Hasil empiris menunjukkan bahwa perusahaan yang kurang konservatif lebih cenderung meningkatkan pengungkapan sukarela sekitar pembiayaan utang dibandingkan waktu lainnya. Secara keseluruhan mendukung dinamika hubungan antara pengungkapan sukarela dan konservatisme.

Farha *et al.*, (2020) menganalisis pengaruh *financial distress* dan tingkat utang terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan dengan konservatisme akuntansi sebagai variabel mediasi. Teknik analisis yang digunakan adalah path analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial distress* memiliki pengaruh positif terhadap konservatisme akuntansi, sementara tingkat utang tidak menunjukkan pengaruh positif. Konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, dan *financial distress* juga berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tersebut. Selain itu, konservatisme akuntansi tidak dapat memediasi pengaruh *financial distress* terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, tetapi dapat memediasi pengaruh tingkat utang terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.